

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Teori Normatif Kelembagaan (Institutional Theory)**

Teori normatif merupakan teori yang menjelaskan bagaimana mempraktekkan proses akuntansi sesuai dengan standar dan pedoman. Teori normative merupakan teori dasar yang melatarbelakangi lahirnya pedoman yang dirumuskan oleh Lembaga dalam mencetuskan standar akuntansi (Ratuanik dkk, 2024a).

PSAK 155 telah menggantikan sistem pendapatan kontraktual yang berubah dari sistem (berbasis aturan) menjadi sistem (berbasis prinsip). Tujuan aplikasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tentang waktu, sifat, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Teori kelembagaan ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai badan akuntansi berusaha menekankan perbedaan antara dua jenis transaksi (transaksi pendapatan dan transaksi kewajiban keuangan), dimana pentingnya suatu perusahaan untuk menciptakan substansi komersial dalam transaksi hutang piutang dengan menerapkan IFRS hingga PSAK 155 sebagai konvergensi IFRS. Diharapkan dengan mengadopsi IFRS, organisasi atau bisnis dapat meyakinkan publik dan masyarakat bahwa bisnis adalah entitas yang sah dan layak mendapat dukungan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018).

### **2.1.2. Laporan Keuangan**

PSAK 1 (Revisi 2009) tentang penyajian laporan keuangan mendefinisikan laporan keuangan sebagai “suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa laporan keuangan merupakan informasi tentang kondisi keuangan yang berkaitan dengan posisi dan kinerja keuangan entitas. Informasi posisi keuangan meliputi aset, kewajiban dan ekuitas entitas, Adapun informasi kinerja keuangan meliputi pendapatan dan beban, termasuk juga keuntungan (gain) dan kerugian (losses) yang timbul di luar kegiatan utama entitas, kontribusi dari pemilik dan distribusinya.

“Pelaporan informasi keuangan adalah suatu publikasi atas informasi ekonomi yang berhubungan dengan bisnis, baik bersifat kuantitatif ataupun kualitatif, yang membantu para pengguna dalam pengambilan keputusan” Menurut Jaffar et al. (2007:20).

### **2.1.3. Tujuan Laporan Keuangan**

IAI telah menerbitkan PSAK No. 1 tentang penyajian laporan keuangan. Dalam PSAK tersebut dijelaskan tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

American Accounting Association (AAA) menjelaskan tujuan laporan keuangan dalam A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT). Di dalam *statement* ini dijelaskan empat tujuan laporan keuangan, yaitu:

1. membuat keputusan tentang pengguna sumber daya yang terbatas, termasuk identifikasi bidang keputusan penting, dan penentuan tujuan dan sasaran.
2. mengarahkan dan mengendalikan secara efektif sumber daya manusia dan sumber daya Perusahaan lainnya.
3. memelihara dan melaporkan penjagaan sumber daya.
4. memfasilitasi dalam fungsi sosial dan pengendalian.

APB statement No. 4 menjelaskan tujuan laporan keuangan dengan membagi menjadi tujuan khusus, tujuan umum, dan tujuan kualitatif.

1. Tujuan laporan keuangan secara khusus adalah menyajikan secara wajar posisi keuangan dan perubahan didalam posisi keuangan lainnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Tujuan laporan secara umum, yaitu :
  - a. Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai kekayaan ekonomi dan labilitas bisnis perusahaan guna mengevaluasi kekuatan dan kelemahan.
  - b. Menunjukkan pembiayaan dan investasi.
  - c. Mengevaluasi kemampuannya untuk memenuhi komitmennya.
  - d. Menunjukkan kekayaan untuk pertumbuhan.
  - e. Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan kekayaan yang dihasilkan dari keuntungan bisnis dan diarahkan untuk menggambarkan dividen yang diharapkan diterima investor.
  - f. Menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kreditur dan pemasok, menyediakan lapangan kerja bagi karyawan, membayar pajak, dan menghasilkan dana guna ekspansi usaha.
  - g. Memberikan informasi kepada manajemen untuk perencanaan dan pengendalian.
  - h. Menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan keuntungan jangka panjang.
  - i. Untuk memberikan informasi keuangan yang berguna dalam memperkirakan potensi pendapatan perusahaan.
  - j. Untuk memberikan informasi yang diperlukan lainnya mengenai perubahan kekayaan dan labilitas perusahaan.
  - k. Untuk mengungkapkan informasi relevan lainnya sesuai kebutuhan para pengguna.
3. Tujuan kualitatif dari akuntansi keuangan, yaitu :
  - a. *Relevance*, yaitu melakukan seleksi informasi yang paling mungkin membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi para pengguna.
  - b. *Understandability*, yaitu informasi terpilih tidak hanya penting tapi harus dapat dimengerti pengguna.

- c. *Neutrality*, yaitu informasi akuntansi diarahkan pada kebutuhan umum para pengguna bukan hanya sekedar kebutuhan khusus pengguna tertentu.
- d. *Verifiability*, yaitu hasil akuntansi dapat dikuatkan oleh pihak lain dengan menggunakan Teknik pengukuran yang sama.
- e. *Timeliness*, yaitu pemberian informasi dilakukan sedini mungkin untuk menghindari keterlambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- f. *Comparability*, yaitu perlakuan akuntansi yang berbeda tidak seharusnya memberikan hasil yang berbeda.
- g. *Completeness*, artinya informasi yang disediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi para pemakai (Winwin & Abdulloh, 2017).

#### **2.1.4 Pernyataan Standar Akuntansi berdasarkan PSAK 115**

Standar akuntansi keuangan disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK menjadi pedoman dalam praktik akuntansi di Indonesia. Adapun PSAK No.115 yaitu PSAK yang mengalami perubahan penomoran dari PSAK No. 72 menjadi PSAK No.155 pada 1 Januari. Prinsip mengenai pengakuan, pencatatan dan pengukuran pendapatan dalam PSAK No.115 isinya sama dengan PSAK 72 yaitu terdapat lima tahapan untuk pengakuan pendapatan yaitu:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan
3. Penyelesaian kewajiban pelaksanaan
4. Menentukan harga transaksi
5. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan

Berikut lima tahapan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan

Kontrak yang dijelaskan dapat dibuat secara tertulis, lisan atau tersirat dalam praktik komersial tertentu, tetapi harus mempertimbangkan kinerja kontrak tersebut dan harus memiliki konten komersial. Pada langkah pertama ini, perusahaan harus memastikan tingkat pemulihan

pembayaran atas barang dan jasa yang diberikan kepada pelanggan. Untuk menilai apakah pembayaran mungkin diperoleh, perusahaan hanya mempertimbangkan kemampuan dan niat pelanggan untuk membayar ketika jatuh tempo. Perusahaan mendaftarkan kontrak dengan pelanggan ketika memenuhi kriteria berikut :

- a. Pihak-pihak yang membuat kontrak telah menerima kontrak (tertulis, lisan atau menurut praktik komersial umum) dan berkomitmen untuk melakukan kewajibannya.
- b. Entitas dapat menentukan hak masing-masing pihak atas barang dan jasa yang disediakan.
- c. Memungkinkan entitas untuk menentukan jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang dialihkan.
- d. Kontrak tersebut bersifat komersial (yaitu risiko entitas, waktu, atau jumlah arus kas masa depan diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari kontrak tersebut).
- e. Kemungkinan besar entitas akan menerima pembayaran yang menjadi haknya sebagai ganti barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pelanggan.

## 2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan

Setelah berhasil melakukan penentuan kontrak, perusahaan akan menentukan barang, jasa atau kombinasi barang dan jasa yang disepakati dalam kontrak akan diakui sebagai kewajiban pelaksanaan. Kewajiban kinerja yang didefinisikan dalam kontrak dengan pelanggan tidak

terbatas pada barang atau jasa yang ditentukan dalam kontrak, tetapi kontrak dengan pelanggan juga dapat mencakup janji yang tersirat dalam praktik bisnis, operasi perusahaan, kebijakan perusahaan atau laporan yang lebih rinci.

### 3. Menentukan harga transaksi

Harga transaksi adalah jumlah yang diharapkan diterima bisnis sebagai imbalan atas penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang akan ditagih atas nama pihak ketiga. Harga transaksi yang diharapkan adalah jumlah pembayaran yang diharapkan diterima oleh perusahaan. Entitas harus mempertimbangkan ketentuan kontrak dan praktik bisnis umum untuk menentukan harga transaksi. Sifat, waktu, dan jumlah pembayaran yang dijanjikan oleh pelanggan akan mempengaruhi estimasi harga transaksi.

### 4. Mengalokasikan harga transaksi berdasarkan pada pelaksanaan kewajiban dalam kontrak

Tujuan dari harga transaksi di amortisasi adalah untuk memungkinkan bisnis mengalokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan tertentu dalam kontrak dalam jumlah yang mencerminkan pembayaran yang diharapkan diterima bisnis sebagai kompensasi atas pengiriman barang dan jasa yang disepakati dalam kontrak dengan pelanggan. Perusahaan mengalokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak berdasarkan harga jual independen relatif. Harga jual independen relatif adalah harga

barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan untuk penjualan individu kepada pelanggan dan dapat diamati ketika perusahaan menjual barang dan jasa secara individual dalam kasus objek yang sama citra pelanggan. Jika harga jual mandiri tidak dapat diamati secara langsung, perusahaan mengestimasi harga jual mandiri pada tingkat yang akan menghasilkan alokasi harga transaksi yang memenuhi target alokasi. Cakupan kontrak meningkat karena perbedaan barang dan jasa tambahan yang dijanjikan.

- a. Pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa baik barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan
  - b. Perjanjian entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Jika barang dan jasa yang dijanjikan tidak dapat dibedakan, perusahaan akan menggabungkan barang atau jasa tersebut dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan sampai entitas menentukan kumpulan barang dan jasa tersebut.
5. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan

Suatu Perusahaan dianggap telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya dengan mengalihkan kendali atas barang dan jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, yang dapat terjadi selama jangka waktu tertentu atau pada titik waktu tertentu yang ditentukan. Kewajiban pelaksanaan diselesaikan pada waktu tertentu kecuali salah satu kriteria berikut

dipenuhi, dianggap memenuhi syarat untuk kinerja dalam jangka waktu tertentu:

- a. Pelanggan sekaligus mendapatkan keuntungan dan menggunakan keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pelaksanaan kewajibannya.
- b. Kinerja perusahaan atas kewajiban kinerja akan menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat membuat atau meningkatkan.
- c. Pelaksanaan kewajiban pelaksanaan perseroan tidak menimbulkan aktiva untuk penggunaan lain bagi perseroan dan perseroan juga berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan kewajiban pelaksanaan yang telah disepakati, dilaksanakan sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Dari adanya pembaruan standar seharusnya menghasilkan laporan yang lebih informatif, karena terdapat metode pengakuan pendapatan yang lebih terperinci. PSAK No. 115 mengatur entitas untuk melaporkan informasi kepada pengguna laporan keuangan atas sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018).

### **2.1.5 Tujuan PSAK 115**

Terbentuknya PSAK 115 memiliki tujuan untuk menetapkan prinsip tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 115 merupakan standar Tunggal pendapatan, di

mana seluruh kontrak dengan pelanggan akan diterapkan sesuai dengan lima model tahap untuk menentukan pengakuan dan pengukuran pendapatan. Adapun tujuan PSAK 115 sebagai berikut :

1. Mengatasi ketidakkonsistenan dan kelemahan dalam persyaratan pendapatan sebelumnya.
2. Menyediakan kerangka kerja yang lebih kuat untuk menyelesaikan masalah mengenai pendapatan.
3. Meningkatkan kesamaan dalam praktik pengakuan pendapatan di berbagai lembaga, industri, yurisdiksi, dan pasar keuangan.
4. Menyediakan informasi yang lebih bermanfaat bagi pengguna laporan.
5. Meningkatkan pelaporan keuangan melalui peningkatan persyaratan pengungkapan.
6. Membuat laporan keuangan menjadi lebih sederhana karena mengurangi jumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018).

#### **2.1.6 Pendapatan**

Pendapatan merupakan salah satu akun utama dalam laporan keuangan melalui pembentukan laporan laba rugi yang hasil nilainya sangat berguna bagi pemegang saham ataupun investor untuk mendapatkan informasi mengenai posisi laporan keuangan ataupun kinerja Perusahaan. Pendapatan menurut PSAK 72 “pengakuan pendapatan kontrak (*over the time*) atau pada satu waktu, *at a point*.” Namun, pengakuan pendapatan kontrak dengan cara ini tidak bisa diterapkan untuk semua jenis kontrak. Beberapa aspek syarat yang harus diperhatikan adalah manfaat oleh pelanggan, peningkatan nilai aset pelanggan, hingga tahap pembayaran kontrak yang telah disepakati Bersama. Apabila ketiga unsur-unsur dari aspek syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengakuan pendapatan tidak bisa dilakukan secara *over the time* melainkan secara *at a point* atau pada titik tertentu (Pratiwi dan Putri, 2021).

“Pendapatan adalah arus kas (ekonomi) yang akan meningkatkan kekayaan entitas, atas aktivitas normal operasi sebuah entitas atau Perusahaan.” (Ratuanik dkk, 2024)

#### **2.1.6.1 Karakteristik Pendapatan**

Terdapat beberapa karakteristik pendapatan diantaranya sebagai berikut

1. Sumber pendapatan  
Terdapat berbagai cara bertambahnya jumlah rupiah aktiva suatu Perusahaan, tetapi tidak semua cara itu mencerminkan pendapatan. Bertambahnya jumlah aktiva suatu Perusahaan berasal dari transaksi modal, laba atas penjualan aktiva selain barang dagang seperti aktiva tetap, surat berharga maupun produk Perusahaan, sumbangan, hadiah serta revaluasi aktiva tetap.
2. Produk dan kegiatan utama Perusahaan  
Barang atau jasa merupakan produk suatu Perusahaan. Mungkin saja suatu Perusahaan dapat menghasilkan berbagai produk yang berlainan jenis ataupun arti pentingnya bagi Perusahaan. Produk yang dihasilkan Perusahaan terkadang secara kebetulan jika dikaitkan dengan aktivitas utama Perusahaan atau yang muncul tidak tetap dipandang sebagai elemen pendapatan non operasional. Sangat perlu diberikan pembatasan tentang pendapatan. Oleh karena itu, diartikannya produk suatu Perusahaan yang meliputi keseluruhan jenis barang yang disediakan atau jasa yang diserahkan kepada pihak lain (konsumen) dengan tidak memandang jumlah rupiah pada tiap jenis produk tersebut atau sering tidaknya produk itu dihasilkan.
3. Jumlah rupiah pendapatan dan proses pembandingan  
Jumlah rupiah dari harga jual persatuan kali kuantitas terjual merupakan pendapatan. Umumnya Perusahaan sangat menginginkan adanya laba dimana jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya yang dibebankan oleh suatu Perusahaan. Setelah pendapatan dan beban dibandingkan, laba atau rugi baru akan diketahui. Jumlah rupiah laba atau pendapatan neto akan terlihat setelah diketahui biaya yang dibebankan Perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan pendapatannya (Putra dkk, 2022a).

#### **2.1.6.2 Jenis-Jenis Pendapatan**

Terdapat jenis-jenis pendapatan diantaranya sebagai berikut

1. Pendapatan operasi dapat diperoleh dari dua sumber pertama penjualan kotor adalah penjualan sebagaimana tercantum dalam faktura tau jumlah

awal pembebanan sebelum dikurangi penjualan return dan potongan penjualan. Kedua penjualan bersih adalah penjualan yang diperoleh dari penjualan kotor dikurangi return penjualan ditambah dengan potongan penjualan lain-lain.

2. Pendapatan non operasi dapat diperoleh dari dua sumber Pertama pendapatan bunga adalah pendapatan yang diterima Perusahaan karena telah meminjamkan uangnya kepada pihak lain. Kedua pendapatan sewa adalah pendapatan yang diterima Perusahaan karena telah menyewakan aktiva nya kepada perusahaan lain. (Pratiwi dan Putri, 2021).

### **2.1.6.3 Sumber-Sumber Pendapatan**

Menurut peraturan menteri dalam Negara Republik Indonesia nomer 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pendapatan BLUD bersumber dari:

1. Jasa layanan  
Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada Masyarakat.
2. Hibah  
Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terkait dan hibah tidak terkait yang diperoleh dari Masyarakat atau badan lain.
3. Hasil kerja sama dengan pihak lain  
Hasil kerja sama dengan pihak lain dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
4. APBD  
Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD berupa pendapatan yang berasal dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBD.
5. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah  
Lain-lain pendapatan BLUD yang sah meliputi jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar eupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau investasi serta pengembangan usaha. (Pratiwi dan Putri, 2021a).

### **2.1.7 Pengakuan Pendapatan**

Mengacu kepada prinsip pengakuan unsur laporan keuangan di Kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDP2LK), dengan demikian, “pendapatan diakui ketika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan

mengalir ke dalam Perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal.” Untuk masing-masing jenis pendapatan, berikut adalah penjelasan mengenai saat kapan umumnya kedua kondisi tersebut terpenuhi untuk dapat diakui sebagai pendapatan (Martani et al., 2016).

- Penjualan barang umumnya pendapatan diakui pada saat penjualan yaitu saat penyerahan barang.
- Pendapatan jasa umumnya dapat diakui pada saat penyerahan jasa yang dapat ditagihkan.
- Pendapatan yang berasal dari penjualan aset umumnya pendapatan dapat diakui pada saat berlalunya waktu atau pada saat aset digunakan.
- Pendapatan yang berasal dari penjualan aset selain persediaan umumnya pendapatan (keuntungan dari pelepasan aset) diakui pada saat penjualan atau pertukaran.  
(Martani et al., 2016).

#### **2.1.7.1 Pengakuan Pendapatan Selain di Waktu Penyerahan Barang/Jasa**

Walaupun pada umumnya pendapatan diakui pada saat penyerahan barang atau jasa, namun mungkin saja pendapatan diakui pada waktu lain, yaitu sebelum penyerahan barang atau jasa maupun setelah penyerahan. Dalam hal ini, jika pendapatan diakui pada waktu yang berbeda pada waktu penyerahan, artinya kriteria pengakuan pendapatan sudah terpenuhi sebelum atau baru terpenuhi sesudah penyerahan. Beberapa contoh pengakuan pendapatan selain saat penyerahan adalah sebagai berikut (Martani et al., 2016).

1. Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan barang/jasa  
Pengakuan pendapatan sebelum penyerahan, umumnya terjadi pada kontrak konstruksi Gedung. Pendapatan sudah dapat diakui sebelum penyerahan Gedung dengan beberapa persyaratan atau kondisi yang harus terpenuhi.
2. Pengakuan pendapatan pada saat barang/jasa selesai, sebelum diserahkan kepada pembeli  
Pengakuan pendapatan pada saat barang sudah siap diantar namun belum sampai ke tangan pembeli, banyak terjadi pada pengakuan pendapatan dari penjualan produk hasil pertanian. Dalam hal ini, pendapatan sudah dapat diakui sebelum barang sampai ketangan pembeli karena kriteria

pengakuan pendapatan sudah terpenuhi. Harga barang sudah ditetapkan dalam suatu kontrak, bersifat mengikat dan tidak bisa dibatalkan.

### 3. Pengakuan pendapatan setelah penyerahan barang/jasa

Pengakuan pendapatan baru dapat dilakukan setelah penyerahan barang, misalnya terjadi pada saat penyerahan barang tersebut memerlukan proses pemesanan atau instalasi di tempat pembeli. Pada kasus semacam ini, pengakuan pendapatan belum dapat dilakukan pada saat barang diantar ke tempat pembeli karena masih terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual untuk melakukan pemasangan atau instalasi. (Martani et al., 2016).

#### 2.1.7.2 Kriteria Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan yang diajukan oleh *Financial Accounting Standard Board* (FASB) terdapat dua kriteria yaitu terdiri dari pendapatan baru diakui jika jumlah pendapatan terealisasi atau cukup pasti akan segera terealisasi dan pendapatan baru diakui jika pendapatan tersebut sudah terbentuk atau terhimpun (Hasanah & Musfiroh, 2024).

#### 2.1.8 Kontrak Dengan Pelanggan

PSAK No. 72 (2020) mengatur tentang perlakuan akuntansi terhadap pendapatan dan biaya dalam sebuah kontrak dengan pelanggan, begitu pula dengan kontrak konstruksi. Ada dua hal yang terdapat dalam kontrak dengan pelanggan Perusahaan jasa konstruksi :

- Retensi, yaitu nilai yang akan diterima kontraktor setelah kontrak konstruksi selesai dan diserahkan secara keseluruhan. Retensi merupakan nilai pembayaran temin yang dengan sengaja ditahan oleh pemberi pekerja sebagai jaminan perbaikan atau pemeliharaan pekerjaan yang telah selesai.
- Uang muka pembayaran, yaitu Sebagian nilai kontrak yang diberikan oleh pemberi kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan. Uang muka pembayaran akan diperhitungkan untuk mengurangi nilai pembayaran kontrak (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018).

### 2.1.9 Biaya

Definisi biaya sebagai penurunan aset atau timbulnya kewajiban dapat dijelaskan dengan konsep kesatuan usaha. Penyerahan produk dalam rangka menciptakan pendapatan, menyebabkan aset (sediaan barang) berkurang. Berkurangnya aset inilah yang disebut biaya. Bila pendapatan yang diperoleh diabaikan atau dipisahkan dengan berkurangnya aset, maka berkurangnya aset sebesar kos barang terjual ini akhirnya harus ditanggung oleh pemilik. Jadi, seandainya semua aset harus dikembalikan kepada pemilik, jumlah rupiah yang kembali ke pemilik akan berkurang sebesar biaya tersebut (Suwardjono, 2018).

### 2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa contoh judul jurnal dan penelitian terdahulu terkait penerapan PSAK No. 115 pada program bantuan sosial.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Judul	Penulis	Ringkasan
1	Analisis Pengakuan, Pengukuran Dan Pengungkapan Pendapatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram	(Putra dkk, 2022)	RSUD Kota Mataram dalam mengakui, mengukur dan mengungkapkan pendapatannya, baik pendapatan LRA maupun pendapatan LO, sudah sesuai

2	Analisis Implementasi Pengakuan Pendapatan Dan Biaya Berdasarkan Pernyataan Akuntansi Keuangan 72 Pada Perusahaan Kontruksi Studi Kasus Pada PT X	(Ratuanik dkk, 2024)	Implementasi PSAK 72 pada PT X khusus nya pada proyek yang diteliti perlu dilakukan penyesuaian dalam mengakui dan mengukur pendapatan yang paling sesuai dengan kontrak yang dikerjakan, agar pendapatan dan biaya yang diakui dapat diukur dengan akurat.
3	Analisis Pengaruh Pengakuan Pendapatan pada Perhitungan Akuntansi	(Rini Puspa, 2021)	Pertambahan nilai secara alami yang ada dikasus bonsai yang mana belum bisa diakui sebagai pendapatan dikarenakan syarat terealisasi belum terpenuhi.
4	Perlakuan Akuntansi atas Pengakuan Pendapatan pada PT "X" di Surabaya	(Zuhroh dkk, 2024)	PT "X" mencatat serta mengakui seluruh penerimaan pembayaran sebagai pendapatan pada priode atau bulan yang sama sebagai dasar menyusun laporan laba rugi bulanan.
5	Analisis Akuntansi Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Pada PT Nexsusled Cahaya Lestari	(Pratiwi dan Putri, 2021)	Konsep penerapan pendapatan di Perusahaan Sebagian penerapannya mengakui pada saat terjadinya transaksi digunakan <i>cash basic</i> , pendapatan Perusahaan bersumber dari pendapatan oprasional yakni pendapatan PT Nexsusled Cahaya Lestari belum efisien sebagai pendapatan berdasarkan PSAK 72 dalam mencatat laporan laba rugi

6	Analisis Pengakuan Pendapatan Dari Pemanfaatan Limbah Produksi PT. SGN PG Glenmore Berdasarkan PSAK 115	(Hasanah & Musfiroh, 2024)	Pengakuan pendapatan Perusahaan telah sesuai dengan lima tahapan yang terdapat dalam PSAK No. 115
7	Pengakuan Pendapatan Pada PT. Jasa Kontruksi Berdasarkan PSAK 72	(Setiawan et al., 2023)	PT. Borneo Perkasa melakukan pengakuan pendapatan menggunakan metode bertahap sepanjang waktu kontrak ( <i>over the time</i> ). Perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan persentase Tingkat penyelesaian proyek.
8	Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga	(Suwardjono, 2018)	Tulisan ini menyajikan beberapa kaidah buku dan gagasan penulis tentang pembentukan istilah-istilah yang digunakan di buku ini. Tulisan ini merupakan pengembangan akuntansi di Indonesia.
9	Analisis Pengakuan Pendapatan Jasa Outsourcing PT. Sukses Sejahtera Bersama Indonesia Berdasarkan PSAK NO. 155	(Islamyi & Sundari, 2024)	Perusahaan mencatat pendapatan pada saat kewajiban telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan PSAK, Dimana pendapatan hanya dapat diakui setelah kewajiban telah diselesaikan
10	Analisis Pengakuan Pendapatan Kontrak Berdasarkan PSAK 115 Pada PT Syma Berkah Indonesia	(Rachman & Sundari, 2024)	Penelitian ini di tujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pengakuan pendapatan PT.Syma Berkah Indonesia yang merupakan salah satu Perusahaan jasa kontraktor di kota Surabaya dengan PSAK 115.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Teori normatif merupakan teori yang menjelaskan bagaimana mempraktekan proses akuntansi sesuai dengan standar dan pedoman. Teori normatif merupakan teori yang melatarbelakangi lahirnya pedoman yang dirumuskan oleh lembaga dalam mencetuskan standar akuntansi.

PSAK No. 115 yang sebelumnya dikenal sebagai PSAK No. 72 merupakan standar akuntansi keuangan terbaru tentang pedoman pengakuan pendapatan kontrak dari pelanggan. Peralihan PSAK No. 72 ke PSAK No. 115 utamanya terletak pada penyesuaian administrative dan penomoran daripada perubahan substansi. Peralihan ini utamanya bertujuan meningkatkan keselarasan dan keterbacaan standar akuntansi di Indonesia. Sedangkan, secara umum, peralihan PSAK No. 72 menjadi PSAK No. 115 ini ditujukan untuk memastikan bahwa standar akuntansi di Indonesia tetap relevan, *up-to-date*, dan sesuai dengan standar internasional, sehingga dapat mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan lebih informatif.

Dengan mengadopsi PSAK No. 115, perusahaan tidak hanya mematuhi regulasi lokal tetapi juga meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan mereka secara signifikan, yang pada akhirnya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan mengurangi berbagai resiko terkait pelaporan keuangan (Setiawan et al., 2023)